

Analisis Politik Luar Negeri Indonesia dalam Aksi Penenggelaman Kapal Vietnam di Perairan Indonesia Tahun 2019

Rusyda Izzana Zayanni Hilmi

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: izzanazayanni@gmail.com

Abstract

The sinking of a Vietnamese vessel in Indonesian waters in 2019 was an incident that highlighted the important role of Indonesia's foreign policy in dealing with challenges at the domestic level. The purpose of this journal is to explore important issues in the incident through the lens of State Level analysis or domestic constraints perspective. This type of research is descriptive, uses quality data analysis strategies, and takes secondary data from literature reviews and the internet. Theory of regional cooperation by K.J. Holsti and Hans J. Morgenthau as well as maritime security ideas by Scott Burchil and Makmur Keliat will be used to analyze the issue. There are several relevant keywords in this analysis, including sovereignty enforcement, bilateral diplomacy, domestic politics, and regional cooperation.

Penenggelaman kapal Vietnam di perairan Indonesia pada tahun 2019 adalah insiden yang menyoroti peran penting politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi tantangan di tingkat domestik. Tujuan jurnal ini menggali isu-isu penting dalam insiden tersebut melalui lensa analisis State Level atau perspektif domestic constraints. Penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif dengan mengaplikasikan data sekunder dari internet dan kajian literatur, serta menekankan pada analisis data kualitatif. Teori Hans J. Morgenthau dan K. J. Holsti mengenai kerjasama regional dan teori Makmur Keliat dan Scott Burchil mengenai keamanan maritim. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan strategi analisis data kualitatif, dan mengambil data sekunder dari kajian literatur dan internet. Teori kerjasama regional oleh K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau serta gagasan keamanan maritim oleh Scott Burchil dan Makmur Keliat akan digunakan untuk menganalisis isu tersebut. Terdapat beberapa kata kunci yang relevan dalam analisis ini, antara lain penegakan kedaulatan, diplomasi bilateral, politik domestik, dan kerja sama regional.

Keywords: Penenggelaman kapal Vietnam, kedaulatan, diplomasi bilateral, politik domestik, kerja sama regional.

Pendahuluan

Di Indonesia, kapal Vietnam ditenggelamkan pada tahun 2019 menjadi sorotan utama dalam dinamika politik luar negeri Indonesia. Insiden ini membuka pintu untuk memahami peran penting politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di tingkat domestik. Dalam konteks ini, analisis dari perspektif "Domestic Constraints" atau State Level Analysis menjadi sangat relevan untuk mengurai kompleksitas insiden ini.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menggali isu-isu kunci yang muncul selama insiden tersebut melalui lensa analisis State Level, dengan fokus pada apa saja yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dari sisi internal. Penelitian ini menekankan pada metodologi yang berpacu pada deskriptif. Penelitian perpustakaan dan online juga merupakan bagian dari pengumpulan data ekstensif turut diterapkan dalam penelitian ini. Analisis data sekunder serta pendekatan data kualitatif diaplikasikan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data.

Untuk mendukung analisis ini, kita akan menggunakan beberapa teori yang relevan, seperti teori dari Hans J. Morgenthau dan K.J. Holsti tentang kerjasama regional, serta gagasan dari Makmur Keliat dan Scott Burchill mengenai keamanan naritim. Teori-teori ini membantu kita dalam menguraikan dinamika politik luar negeri Indonesia sehubungan dengan insiden penenggelaman kapal Vietnam.¹

Menurut Hans J. Morgenthau dan K.J. Holsti, kerjasama regional berpacu pada struktur sosial yang sama serta sekelompok negara dengan kesamaan lokasi geografis.² Kecenderungan yang tidak dapat ditampung akibat saling ketergantungan terjadi karena adanya rasa saling butuh akan hal sumber daya untuk kepentingan nasional. Rasa saling butuh yang menjelma menjadi keinginan bersama mampu menghindarkan negara-negara dari ketidakstabilan dalam satu kawasan. Pembangunan rasa aman, baik secara politik dan ekonomi, menjadi dasar kerjasama yang akhirnya terjalin. Kerjasama tersebut biasanya berlangsung di bidang pertahanan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga dapat berlangsung di bidang lainnya.

Ada banyak sekali konteks yang dapat mendukung kerjasama. Akan tetapi, ada pula interaksi serta hubungan yang melibatkan kepentingan pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masalah yang sama. Kerjasama regional ditujukan untuk memberikan dukungan kepada negara-negara di kawasan, terutama Asia Tenggara, serta menjaga stabilitas regional atas kasus pengungkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia.³

Beberapa kata kunci yang akan menjadi fokus dalam analisis ini meliputi penegakan kedaulatan, diplomasi bilateral, politik domestik, dan kerja sama regional. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Indonesia menghadapi dan menangani tantangan dalam kebijakan luar negerinya.

Konsep Keamanan Maritim

Keamanan bersama atau keamanan komprehensif, menurut Scot Buchill, keamanan negara akan meningkat ketika pemerintah mampu meningkatkan keamanannya. Hal tersebut terjadi karena ancaman keamanan di kawasan tersebut sedang berkembang. Contohnya, kerusakan lingkungan, pengembangan nuklir, serta krisis ekonomi. Sejumlah faktor menyebabkan adanya pergeseran cara pandang, yakni adanya ketergantungan, kemajuan teknologi, serta perbatasan internasional. Saling ketergantungan tersebut merupakan kondisi di mana dimensi militer dikalahkan oleh dimensi global akibat konflik yang memiliki potensi untuk diselesaikan secara regional. Menurut Bukell (2001), ketahanan pangan, keamanan energi, keamanan ekonomi, keamanan maritim, keamanan manusia, dan ancaman lingkungan merupakan isu-isu non-tradisional. Isu-isu ini bisa menjadi isu yang tumpang tindih karena saling terkoneksi.⁴

Penggunaan air, sebagai masalah umum, dan ancaman yang berlangsung di area tersebut, memerlukan peningkatan keamanan maritim. Kolaborasi regional, kebijakan, serta pertimbangan keamanan merupakan hal-hal yang bisa terdampak oleh gejolak maritim. Oleh karena itu, tanggung jawab seluruh negara ialah menjaga keamanan laut mereka

masing-masing. Apalagi jika negara tersebut memiliki laut yang sangat luas. Isu pertahanan, dalam maritim, yang hukan termasuk ancaman militer, yakni imigrasi ilegal, penyelundupan kayu, pencurian sumber daya laut, serta ancaman-ancamab kain.

Untuk mencapai kerjasama maritim, terdapat dua pendekatan utama: (1) membentuk oganisasi kejasama regional; dan (2) melalui diplomasi bilateral⁵. Isu mengenai kelautan harus diperhatikan karena semakin luas yang merembet pada permasalahan kedaulatan, sumber data, navigasu, serta supremasi hukum. Tahun 2008, Report on Oceans and the Law of the Sea, menjabarkan bahwa hal-hal yang termasuk ke dalam ancaman keamanan maitim ditampik oleh Sekjen PBB karena sebenarnya tidak ada definisi pasti keamanan maritim:

1. Maraknya teroris dengan melakukan serangan fisik, instalasi kapal, serta mengganggu ekonomi negara
2. Senjata yang diperjualbelikan secara ilegal
3. Armed Robbery serta lembajakan, hal ini mampu membahayakan pelaut, keamanan jalur komersial, dan keselamatan navigasi
4. Hak Asasi Manusia yang diabaikan dengan melakukan perdagangan manusia serta penyeludupan secara tidak layak di dalam kapal
5. Terancamnya stabilitas laut serta hubungan antarnegara akibat unreported, unregulated, and illegal fishing

Diplomasi Bilateral dalam Penegakan Kedaulatan dan Perairan Indonesia

Pada tahun 2019, Indonesia menjadi sorotan internasional ketika melaksanakan aksi penenggelaman kapal Vietnam di perairan Indonesia. Aksi ini adalah hasil dari berbagai pertimbangan, baik dalam aspek internal maupun eksternal yang memengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pembahasan ini akan memfokuskan pada analisis politik luar negeri Indonesia dalam konteks ini dari perspektif Domestic constraints, yang mencakup dipengaruhi kebijakan luar negeri akibat beberapa faktor dari luar.⁶

Penegakan kedaulatan merupakan prinsip dasar dalam politik luar negeri Indonesia. Perairan Indonesia merupakan aset nasional yang vital, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindunginya dari pelanggaran. Masuknya kapal-kapal asing ke perairan Indonesia tanpa izin adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam aksi penenggelaman kapal Vietnam.

Indonesia selalu mendukung penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi. Dalam kasus penenggelaman kapal Vietnam, Indonesia terlibat dalam upaya diplomasi bilateral dengan pemerintah Vietnam. Pemerintah Indonesia melakukan kontak langsung dengan pemerintah Vietnam guna memperoleh solusi yang mendukung kedua belah pihak. Sayangnya, jika upaya diplomasi tidak berhasil, langkah keras diambil.

Sejumlah faktor domestik memengaruhi keputusan Indonesia dalam kasus ini. Pertama, tekanan dari masyarakat Indonesia untuk melindungi kedaulatan perairannya sangat kuat. Ini menciptakan tekanan pada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran kedaulatan. Kedua, faktor politik domestik, termasuk pemilu dan politik dalam negeri, dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dampak kebijakan luar negeri terhadap dukungan politik di dalam negeri.

Keputusan untuk menenggelamkan kapal Vietnam memiliki konsekuensi internasional. Meskipun Indonesia telah melakukan upaya diplomasi bilateral, tindakan keras seperti ini dapat merusak hubungan bilateral. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dampak terhadap hubungan luar negeri dengan Vietnam dan negara-negara lain dalam wilayah tersebut.

Keputusan untuk menenggelamkan kapal Vietnam memiliki konsekuensi internasional. Meskipun Indonesia telah melakukan upaya diplomasi bilateral, tindakan keras seperti ini dapat merusak hubungan bilateral. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dampak terhadap hubungan luar negeri dengan Vietnam dan negara-negara lain dalam wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia harus mencari keseimbangan antara penegakan kedaulatan dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, seperti Vietnam, dalam konteks diplomasi bilateral. Kesuksesan diplomasi bilateral sangat penting untuk menjaga stabilitas di kawasan ini.

Diplomasi, selama proses berlangsung, ada beberapa tingkatan pelaksanaan yang harus diperhatikan, yakni bilateral, regional, sampai internasional.

Analisis Politik Luar Negeri Indonesia dalam Aksi Penenggelaman Kapal Vietnam di Perairan Indonesia Tahun 2019

Pada tahun 2019, Indonesia menjadi pusat perhatian internasional ketika pemerintahnya mengambil langkah kontroversial dengan diadakannya penenggelaman beberapa kapal Vietnam yang dituduh menerapkan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Tindakan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks penegakan kedaulatan, diplomasi bilateral, politik domestik, dan kerja sama regional Indonesia. Dalam analisis politik luar negeri, kita dapat memahami tindakan ini melalui perspektif "*Domestic constraints*" atau analisis tingkat negara.

Dalam analisis "*Domestic Constraints*" atau "*State Level*," kita harus mempertimbangkan sejumlah faktor domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, faktor keamanan dan kedaulatan adalah elemen utama dalam tindakan ini. Keamanan perairan Indonesia adalah perhatian utama, dan tindakan ini mewakili upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Penegakan kedaulatan merupakan aspek penting dari politik luar negeri Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal Vietnam merupakan usaha untuk mengamankan perairan Indonesia dan melindungi sumber daya laut yang berlimpah di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi wilayah perairannya dan hak kedaulatan atas sumber daya lautnya.

Dalam konteks penenggelaman kapal Vietnam, penting untuk mempertimbangkan kedaulatan Indonesia atas perairan yang menjadi sumber ketegangan. Wilayah maritim Indonesia memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi. Kedaulatan dalam wilayah ini adalah faktor utama yang harus dijaga dalam kebijakan luar negeri. Kedaulatan dan keamanan nasional terkait erat. Indonesia harus memastikan bahwa perairan nasional aman dari berbagai ancaman, termasuk ilegal fishing, sehingga sumber daya laut dan kepentingan nasional terlindungi.

Sikap yang minim perhatian terkadang diberikan oleh negara yang merasa memiliki banyak kekayaan. Sedangkan negara berkembang

biasanya kesusahan untuj mengelola serta mengatur sumber dayanya. Menurut Hudskn, sumber daya melimpah yang dimiliki oleh negara cenderung membuat kebijakan luar negerinya pasif. Selain memiliki masyarakat yang cenderung pasif, Indonesia pun seakan tidak peduli dengan sumber dayanya.

Salah satu nasional atribut negara adalah sumber daya alam di mana sumber daya ini perlu untuk dijaga. Aspek sumber daya sebagai nasional attribute ini akan berdampak ke aspek lain seperti militer dan ekonomi.

Kedua, faktor politik domestik memainkan peran penting. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan opini publik, terutama dari kelompok nasionalis yang mendukung tindakan tegas dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan. Namun, mereka juga harus memperhitungkan opini kelompok yang lebih suka pendekatan diplomatik. Di tingkat domestik, tindakan pemerintah Indonesia ini mendapat beragam reaksi. Adanya dukungan kuat dari kalangan nasionalis yang melihatnya sebagai upaya tegas untuk menjaga kedaulatan. Namun, ada juga kritik dari kelompok yang lebih cenderung memilih solusi diplomatik. Faktor-faktor politik domestik ini dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam situasi seperti ini.

Terakhir, peran diplomasi dan hubungan bilateral dengan Vietnam sangat relevan dalam analisis tingkat negara ini. Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, dan tindakan seperti ini dapat memengaruhi dinamika hubungan bilateral. Ketika Indonesia menghadapi insiden ini, diplomasi bilateral dengan Vietnam menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia harus menjalankan diplomasi yang efektif untuk mengelola konflik dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan. Diplomasi bilateral adalah saluran utama untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kedua negara harus berunding dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Mempertimbangkan hal di atas, Kementerian Luar Negeri telah melakukan tindakan yang masuk akal sebagai pelaku diplomasi dan berpersn penrinh dalam kasus kemaritiman. Hal tersebyt tentunya berdampak pada terlengkapinya amanat Kementerian tersebut dalam hal politik luar negeri yang bebas aktif.⁷

Dari permasalahan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah Indonesia khususnya pada pemerintahan Joko Widodo membentuk kebijakan untuk menngelamkan kapal ikegal, hal ini mendasari atau menjadi awal mula kebijakan penenggelman kapal ini dilakukan, supaya kapal-kapal ilegal tersebut tidak lagi melakukan aksi mengambil ikan secara ikegal serta untuk memutus rantai masuknya kapal ilegal ke Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada singkatnya prodedur pemeliharaan serta penanganan barang bukti bendera kapal asing untuk melakukan aksi ilegal.

Selain itu berdasarkan kasus penenggelman kapal Vietnam di perairan Indonesia ini respons Vietnam di atas, pemerintah Vietnam sebaiknya dapat bertundak lebih agresif terhadap pemringah Indonesia. Akan tetapi, Vietnam tidak melakukan hal tersebut. Pada tahun 2014-2018 dapat dilubut bahwa Vietnam sama sekali tidak menunjukkan tindakannya. Di tahun tersebut, kerjasama kemitraan komprehensif, dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia ditingkatkan menjadi kemitran strategis. Lalu, pada tahun 2018 Indonesia dan Vietnam kembali melakukan kerjasama dan menandatangani kemitraan strategis hingga tahun 2023. Dalam beberapa hubungan bilateral antar kedua negara Vietnam dan Indonesia, hubungan penting dalam perdagangan Indonesia-Vietnam diangkat. Guyen Xuan Thuy, duta besar Vietnam dan Susi Pudjiastuti, pada November 2014 bertemu dengan rencana membahas mengenai isu tersebut. Pertemuan tersebut mengisyaratkan bahwa nelayan-nelayan dari Vietnam akan dididik dengan baik oleh Pemerintah Vietnam.

Penenggelman kapal sebagai buah dari kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya alam yang tadinya menjadi fokus Indonesia menjadi beralih. Sebelumnya, Indonesia bersikap dengan sangat pasif saat berunding dengan perwakilan negara lain. Akan tetapi, Indonesia akan bertindak secara agresif jika konsensus tidak dapat tercapai.

Dengan melaksanakan penenggelman kapal sebagai buah kebijakan, Indonesia justru menaikkan kredibilitas karena sudah berani dan sanggup mempraktekkan hukum nasional di wilayah Indonesia sendiri, dan melihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mempraktekan good governance.⁸

Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas, dapat ditarik garis konklusi bahwa salah satu atribut nasional yang berupa sumber daya alam dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri. Konsep power dapat dijelaskan oleh sumber daya alam dalam Hubungan Internasional. Hal tersebut dapat ditilik dari ditenggelamkannya kapal Vietnam di perairan Indonesia sebagai buah kebijakan tahun 2019. Terlihat sangat jelas bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan agresif serta tegas yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi isu di perairannya. Sebab, kegiatan ilegal fishing sangat mempengaruhi kemaritiman Indonesia dan Vietnam yang cenderung ingin melindungi lautnya. Data dan Level of analyse of national attribute memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang jaya sedangkan Vietnam sendiri mengisyaratkan dirinya sebagai negara yang kekurangan. Memang, dalam ukuran, Indonesia berada di atas Vietnam.

Tindakan penenggelaman kapal Vietnam oleh Indonesia mencerminkan upaya keras negara ini dalam menegaskan kedaulatan teritorialnya, khususnya dalam perairan yang menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. Meskipun hal itu terjadi, diplomasi bilateral tetap menjadi alat penting dalam mengelola konflik dengan Vietnam untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, politik domestik memiliki pengaruh terhadap keputusan luar negeri. Dalam konteks ini, isu-isu politik dalam negeri Indonesia, seperti tekanan dari kelompok nasionalis, mungkin telah mempengaruhi langkah-langkah yang diambil dalam insiden tersebut. Penegakan kedaulatan Indonesia dan penanganan insiden semacam ini juga mencerminkan upaya Indonesia dalam mendukung kerja sama regional, khususnya dalam konteks keamanan maritim. Ini selaras dengan kerjasama regional yang diusulkan oleh Hans J. Morgenthau dan K.J Holsti.

Analisis politik luar negeri Indonesia dalam insiden penenggelaman kapal Vietnam di tahun 2019 merupakan contoh yang menarik dalam pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor domestic constraints memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Diplomasi yang bijaksana dan pemahaman terhadap dinamika politik domestik sangat penting dalam menjaga stabilitas dan hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Endnotes

¹ Scott Burchill, dkk, 2001. *Theories of International Relations*, second edition, Palgrave, New York.

² Makmur Keliat. (2009). "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 13, No.1.

³ Acharya, A. (2009). *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*. Cornell

University Press.

⁴ Bueger, Christian. (2015). "What is Maritime Security?", dalam Marine Policy, Vol.53.

⁵ Hikmahanto Juwana. (2018). "Diplomasi Luar Negeri Indonesia: Teori dan Praktik." Kencana.

⁶ Purnomo, E. A. (2017). "Domestic Factors in Indonesia's Foreign Policy Decision Making." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(3), 213-234.

⁷ BPPK Kemlu. 2015. "Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri"

⁸ Emmers, R. (2016). ASEAN and the G20: Distinctive Approaches to Regional and Global Governance. Pacific Review, 29(1), 43-59.

References

Acharya, A. (2009). Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism. Cornell University Press.

BPPK Kemlu. 2015. "Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri"

Bueger, Christian. (2015). "What is Maritime Security?", dalam Marine Policy, Vol.53.

Emmers, R. (2016). ASEAN and the G20: Distinctive Approaches to Regional and Global Governance. Pacific Review, 29(1), 43-59.

Hikmahanto Juwana. (2018). "Diplomasi Luar Negeri Indonesia: Teori dan Praktik." Kencana.

Indonesian Ministry of Foreign Affairs. (2020). "Press Release on the Sinking of a Vietnamese Vessel." [Link: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1493/berita/teks-berita/pernyataan-pers-dari-kemlu-republik-indonesia-tentang-penenggelaman-kapal-vietnam-dikawasan-natuna-sea>]

Jakarta Post. (2019). Indonesia's 'sink the vessel' policy yields mixed results. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com>

Keliat, Makmur. (2009). "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No.1.

Purnomo, E. A. (2017). "Domestic Factors in Indonesia's Foreign Policy Decision Making." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(3), 213-234.

Storey, I. (2015). ASEAN and the South China Sea: The Limits of Lawfare. Contemporary Southeast Asia, 37(2), 173-198.

The Diplomat. (2019). Indonesia and Vietnam's South China Sea Standoff. Retrieved from <https://thediplomat.com>

